

ISSN : **2987-078X**
E-ISSN : **2987-078X**
DOI : **10.30092/tabayyun** by Crossref

Volume 04 Nomor 02 Desember 2023,
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tabayyun>

Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang Dalam Menghadapi Peretasan dan Disinformasi Jurnalis

The Role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Palembang in Dealing with Hacking and Disinformation of Journalists

Tuti Inayah¹⁾, Sumaina Duku²⁾, Ahmad Harun Yahya³⁾

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: tuti08@gmail.com

History		Publisher: Program Studi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia
Received	31 Agustus 2023	Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. 
Revised	18 September 2023	
Accepted	18 September 2023	
Published	30 Desember 2023	

Abstract

In the midst of widespread hacking and disinformation attempts by journalists. The Alliance of Independent Journalists (AJI) Palembang continues to strive to prevent hacking and disinformation, with the dynamics of rapid information transformation. Professional journalists are required not to get caught up in disinformation. The challenge of facing this problem becomes even more difficult when social media (Medsos) attacks. Social media has become a public space for the exchange of opinions and information which is very popular at the moment. This is a challenge for the Alliance of Independent Journalists (AJI) Palembang in determining the initial steps for the role that must be taken in preventing and protecting journalists who experience hacking and disinformation. Researchers used qualitative methods through documentation, observation and interview approaches. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that AJI's role in dealing with hacking and disinformation is in the way the press works. This step is consistently taken by AJI considering that hacking and disinformation are also often used to damage press freedom or the credibility of defenders of press freedom.

Keywords: Role; AJI; Hacking; Disinformation

Abstrak

Di tengah maraknya upaya peretasan dan disinformasi jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang terus berupaya dalam pencegahan peretasan dan disinformasi, dengan dinamika transformasi informasi yang cepat. Jurnalis profesional dituntut tidak terjebak pada disinformasi. Tantangan menghadapi permasalahan itu semakin berat kala gempuran media sosial (Medsos). Medsos menjadi ruang publik tempat pertukaran pendapat dan informasi yang sangat populer pada saat ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dalam menentukan langkah awal peran yang harus dilakukan dalam pencegahan dan perlindungan kepada jurnalis yang mengalami peretasan dan disinformasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan dokumentasi, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran AJI

dalam menghadapi peretasan dan disinformasi ialah dengan cara-cara kerja Pers. Langkah ini konsisten dilakukan AJI mengingat peretasan dan disinformasi juga yang kerap digunakan untuk merusak kebebasan Pers atau pun kredibilitas pembela kebebasan pers.

Kata Kunci; Peran; AJI; Peretasan; Disinformasi

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi kesatuan. Sebagai penopang, Indonesia memiliki empat pilar yang saling berperan. Keempat pilar tersebut adalah; eksekutif, legislatif, yudikatif dan informasi. Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan. Di sisi lain, lembaga peradilan menjalankan fungsi yudikatif dan mengawasi fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah. "Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pers No. 1 No. 40 Tahun 1999, untuk menjamin kebebasan pers, Pers Nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi." (UU Pers No 1 No 40, 1999)

Hal lain yang muncul dari Reformasi Indonesia adalah ledakan media cetak dan elektronik dan akhirnya media sosial. Saat ini, jumlah media cetak dan elektronik serta jumlah jurnalis atau jurnalis berkembang pesat. Namun dibalik reformasi yang berubah tingkat keamanan masih sangat lemah seperti adanya peretasan dan disinformasi pada berita yang dibuat oleh media lemahnya sistem tidak bisa dijadikan alasan bagi siapapun untuk melakukan peretasan atau vandalisme digital. Seperti kasus Peretasan dan Disinformasi yang dialami oleh wartawan Antara Sumatera Selatan yaitu Yodi Prabowo pada Tahun 2020 silam akun yang berhasil diretas adalah Facebook. Yodi Prabowo adalah seorang jurnalis yang bekerja untuk Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara cabang Palembang. Menurut berita yang dilaporkan pada saat itu, akun Facebook milik Yodi Prabowo telah diretas oleh orang yang tidak dikenal pada bulan Juli 2020. Setelah akunnya diretas, pelaku mengubah informasi profil dan foto Yodi Prabowo, serta mengunggah beberapa postingan yang menyesatkan dan mengandung disinformasi.

Yodi Prabowo kemudian melaporkan kasus ini ke polisi dan berhasil mendapatkan kembali akses ke akun Facebook-nya setelah proses verifikasi yang dilakukan oleh Facebook. Yodi Prabowo juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap berita atau informasi yang menyesatkan di media sosial dan

selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi tersebut. (Prabowo, 2020)

Selain Yodi Prabowo yang mengalami kasus peretasan, Wartawan Narasi yaitu Akbar Wijaya atau akrab disapa Jay Akbar juga mengalami kasus serupa pada 24 September 2022, silam akun yang berhasil di bobol Ini WhatsApp. Jay Akbar mengaku menerima SMS melalui WhatsApp berisi sejumlah link sekitar pukul 15.29 WIB. Meskipun Jay tidak mengklik tautan apa pun di pesan teks, hampir seketika, sekitar 10 detik setelah membaca pesan teks, dia kehilangan kendali atas nomor atau akun WhatsApp-nya. Namun ternyata Jay Akbar juga tidak memiliki akses ke akun lain, termasuk nomor teleponnya. (Akbar, 2022)

Selain itu, Sasmito Madrim, Presiden Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mengalami kasus disinformasi pada Februari 2022 dengan munculnya informasi palsu yang memuat narasi ganda sebagai berikut; Sasmito dukung pemerintah bongkar Liberty Press, Sasmito dukung pemerintah bangun Bendungan Benapourejo, Sasmito minta Polri tangkap Harris Azar dan Fatia. Kasus Peretasan dan Disinformasi yang dialami wartawan tersebut meliputi akses tidak sah ke akun email dan media sosial, serangan DDoS, dan serangan yang ditujukan untuk mengintimidasi atau membatasi aktivitas jurnalistik mereka (Madrim, 2022). Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki peran signifikan dalam mengatasi peretasan dan disinformasi yang dihadapi jurnalis antara lain;

- a) Memberikan pelatihan dan sumber daya tentang literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi jurnalis dari peretasan dan disinformasi.
- b) Mengadvokasi kebebasan berbicara dan hak pers, dan menentang tekanan pemerintah dan organisasi untuk membatasi hak-hak ini.
- c) Memfasilitasi kolaborasi dan berbagi informasi di antara jurnalis dan organisasi media untuk memerangi disinformasi dan mempromosikan jurnalisme yang kredibel.
- d) Meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya jurnalisme yang independen dan terpercaya, serta bahaya disinformasi.
- e) Menyediakan platform bagi jurnalis untuk melaporkan insiden peretasan dan disinformasi serta mencari dukungan dari Aliansi Jurnalis Independen dan organisasi lainnya.

Peretasan dan disinformasi merupakan masalah yang semakin parah dan menjadi sumber stres bagi jurnalis dan pekerja. Sementara disinformasi dapat mengungkapkan informasi yang menonjol atau tidak menarik yang dapat membahayakan kredibilitas media dan jurnalis, penganiayaan dapat mengancam integritas dan reputasi jurnalistik. Wartawan dapat dipengaruhi oleh persekusi dalam berbagai cara, termasuk dengan mendapatkan akses ke informasi pribadi mereka dan menyembunyikan keberadaan fisik mereka. Jika mereka menulis tentang topik sensitif atau kontroversial, jurnal bisa menjadi sumber bahaya.

Peretasan dan disinformasi adalah masalah yang semakin sering terjadi di Indonesia dan dunia, terutama dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan media sosial. Peretasan dapat merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang untuk masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan, dan mengakses, mencuri, atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. Disinformasi, di sisi lain, mengacu pada informasi yang salah, menyesatkan, atau sengaja dimanipulasi untuk menyebarkan pesan tertentu atau mempengaruhi opini publik.

Kedua masalah ini memiliki dampak yang serius dan berbahaya bagi masyarakat. Peretasan dapat menyebabkan kehilangan data atau informasi penting; baik oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial; kerusakan reputasi, dan bahkan kehilangan nyawa jika data yang diakses oleh peretas adalah informasi medis atau keamanan nasional. Sementara itu, disinformasi dapat mempengaruhi pandangan publik tentang suatu isu atau topik tertentu, sehingga dapat mengganggu proses demokrasi dan membuat masyarakat bingung atau terpecah belah.

Dalam konteks jurnalistik, peretasan dapat mengakibatkan jurnalis kehilangan akses ke data atau informasi penting, mengganggu pengiriman laporan, atau bahkan membahayakan keselamatan fisik jurnalis jika informasi identitas pribadi salah ditangani atau tidak digunakan sama sekali. Disinformasi, juga dikenal sebagai informasi palsu, adalah informasi yang tidak dapat dipercaya yang disebarluaskan dengan maksud untuk membentuk opini publik. Dalam konteks jurnalisme, misinformasi dapat merusak reputasi publikasi, merusak integritas editorial, dan bahkan merusak sudut pandang politik atau sosial yang penting.

Ketika informasi disampaikan dengan persuasi, konsekuensinya bisa menjadi semakin bermasalah bagi jurnalis. Sebagai contoh, praktik email jurnalistik memungkinkan penerimanya untuk menekan konten yang telah dibagikan atau ditulis oleh jurnalis, menjunjung tinggi integritas jurnalistik, dan merusak reputasi media. Karena itu, jurnalis perlu memahami risiko dan bahaya yang terkait dengan kelalaian dan kesalahan informasi, dan pekerjaan mereka harus komprehensif dengan pengetahuan terkini tentang ancaman keamanan siber. Sebagai tindak lanjut, perlu adanya kesepakatan dari Perhimpunan Wartawan Siberia, Organisasi Wartawan, dan Pemerintah untuk memperkuat perlindungan Perhimpunan Wartawan dan Pers dari Ancaman Peretasan dan Disinformasi.

Pasca reformasi, komunitas pers Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama terkait kebebasan pers. Selain itu, berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dua poin tersebut baik itu gerakan reformasi maupun lahirnya Undang-Undang Pers menjadikan harapan besar bagi publik sebagai pembawa aspirasi sekaligus institusi kontrol sosial. Karena sekitar 30 tahun lebih dimasa kekuasaan Orde Baru, Pers Indonesia dibungkam dalam bayang-bayang pembredelan dan tak mampu menjalankan salah satu fungsinya sebagai control sosial maupun Wacht Dog (anjing penjaga) kehidupan bernegara di Bumi Nusantara ini. Target utama penguasa Orde Baru terhadap pers kala itu adalah menciptakan pers yang tunduk pada kekuasaannya.

Metode Penelitian

Kajian terhadap Peran Aliansi Jurnalis Independen Dalam Menghadapi Peretasan dan Disinformasi Jurnalis Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bogdan menjelaskan: "Penelitian kualitatif, sebagai tradisi khusus dalam ilmu sosial, pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia" (RC.Bogdan&Biglen, 1992). Yang pertama dilakukan ialah Pendekatan Penelitian, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yaitu "bentuk-bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, meliputi bentuk, sifat, aktivitas dan fenomena lainnya" (Sukmadinata, 2006).

Yang kedua ialah menggunakan Teknik Pengumpulan Data,

1. Observasi

Metode observasi adalah observasi yang dilakukan tanpa peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini, peneliti hanya melakukan satu fungsi: melakukan observasi.

Pengamatan dalam penelitian ini secara umum terfokus pada program AJI, implementasi program AJI, dan peran program AJI dalam memberantas peretasan dan disinformasi di Kota Palembang. Observasi adalah kajian langsung terhadap masalah yang diteliti, sehingga secara empiris dapat diketahui fenomena apa yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara lisan atau tatap muka antara peneliti dengan manusia sumber data. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menanyakan informasi apa yang akan diteliti dan dibutuhkan, serta siapa yang akan diwawancarai. Dengan bantuan wawancara mendalam diperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pertanyaan yang diteliti dan informasi yang mungkin dapat memberikan informasi yang lengkap secara rinci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa catatan tertulis, terutama data dokumen, arsip, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen terkait AJI, program kerja, struktur organisasi AJI Kota Palembang dan berbagai arsip lainnya.

Dan yang terakhir menggunakan Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Hiberan, "mengurangi data berarti menyintesis, memilih yang penting, memusatkan perhatian pada yang penting, dan mencari tema dan intisari." Jadi data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mengambilnya kembali saat mereka membutuhkannya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa pengungkapan naratif tertulis untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa berdasarkan

urutan kronologis peristiwa. "Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dll. Namun, dalam metode penelitian ini, teks naratif sering digunakan untuk menyajikan data".

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data berupa penarikan kesimpulan dari data validasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. "Kesimpulan yang ditarik menjadi kesimpulan yang kredibel dalam menarik kesimpulan awal yang ditarik pada tahap awal dan didukung oleh data yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke bidang pengumpulan data".

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti dapat menggunakan analisis validasi untuk mengekstrapolasi data yang diperoleh di lapangan dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pertanyaan yang diteliti dari hasil awal yang masih tentatif.

Hambatan saat penelitian ialah kondisi sedang dalam keadaan sakit dikarenakan kecelakaan yang tak memungkinkan saya bisa datang langsung ke tempat penelitian, maka dari itu penelitian dilaksanakan melalui daring atau online. Namun untuk kemudahannya sendiri ialah diberinya kesempatan dan dibantu dengan baik oleh pihak penelitian untuk dilaksanakannya secara online untuk penelitiannya.

Hasil Dan Pembahasan

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalistik yang didirikan pada 7 Agustus 1994 oleh para jurnalis muda Indonesia asal Bogor. AJI muncul sebagai kekuatan perlawanan pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.



Gambar 4.1

Logo Aliansi Jurnalis Independen

Bab 1, Pasal 3 Anggaran Dasar Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa AJI diwakili dengan kombinasi warna merpati dan pena ungu tua serta huruf AJI. AJI didirikan oleh 58 wartawan dan kolumnis pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, di bawah Deklarasi Sirnagari. Pena mengatakan wartawan harus independen.

Aliansi Jurnalis Independen Palembang beralamat di Jl. Bidar No.1331, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137 Adapun untuk menghubungi AJI bisa melalui :

- 1) Telepon : 0813-6825-8914
- 2) Email : admin@ajipalembang.id

2. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didirikan sebagai upaya komunitas media Indonesia untuk menentang kekuasaan rezim Orde Baru. Sumbernya adalah artikel yang diterbitkan pada 21 Juni 1994 oleh Detik, Editor, dan Tempo. Ketiganya dipecahkan oleh kecepatan beritanya, yang dianggap penting oleh penguasa. Banyak orang bersatu dan menentang tindakan represif ini di banyak kota.

Setelah itu, gerakan anti-pemerintah semakin meningkat. Terakhir, di Sirnagalih, Bogor, pada 7 Agustus 1994, sekitar 100 orang berkumpul. Ini termasuk jurnalis dan kolumnis. Pada hari itu, mereka menandatangani deklarasi sirnagalih. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hak publik atas informasi harus dihormati, bahwa media tidak boleh dikekang, bahwa jurnalis tidak memiliki tempat di sana, dan bahwa AJI tetap ada.

AJI berjalan di bawah tanah karena didaftarkan sebagai organisasi ilegal selama Orde Baru. Organisasi dikelola oleh dua puluh aktivis jurnalis. Untuk

menghindari tekanan dari pihak keamanan, sistem manajemen dan perorganisasian diselenggarakan secara tertutup. AJI memiliki kurang dari 200 jurnalis pada saat itu, jadi sistem kerja organisasi seperti itu sangat efektif untuk memenuhi tujuan organisasi. Para aktivis dan orang-orang dari Forum Jurnalis Independen Bandung (FOWI), Forum Diskusi Jurnalis Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen Jakarta (SJI) adalah para pendiri organisasi ini. Organisasi ini juga menerbitkan majalah independen yang kemudian berganti nama menjadi Suara Mandiri.

Gerakan bawah tanah ini menghabiskan banyak uang. Ahmad Taufik, Eko Maryado, dan Danang Kukuh Wardoyo, tiga anggota AJI, dipenjara pada bulan Maret 1995. Taufik dan Eko menjalani hukuman penjara tiga tahun, sedangkan berdasarkan sumber yang di akses dari laman resmi Sejarah AJI Indonesia yang menjelaskan ;

“Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media tidak memiliki banyak pilihan. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan meminta pemimpin redaksi untuk menolak untuk bekerja untuk media mereka.” (AJI, 27 Mei 2023)

Konsisten mendukung tujuan ini, AJI adalah salah satu dari banyak kelompok yang mendukung demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Oleh karena itu, AJI diakui sebagai pendukung kebebasan Pers dan bagian dari Gerakan pro-demokrasi di Indonesia, Evaluasi di dalam dan luar negeri, ada juga peserta dari *International Federation of Journalists (IFJ)*, *Article 19* dan *International Exchange of Free Expressions (IFEX)* AJI sejak itu menjadi mitra dari tiga Organisasi Internasional.

Selain itu, banyak organisasi asing, khususnya lembaga swadaya masyarakat internasional, yang mendukung kerja AJI. Salah satunya adalah badan PBB yang berkedudukan di Indonesia. Perhatian dalam dan luar negeri. Beberapa berasal dari *Article XIX, International Freedom Expression Exchange (IFEX)*, dan *International Federation of Journalist (IFJ)*. Tiga organisasi internasional tersebut kemudian bermitra dengan AJI. Selain itu, banyak organisasi asing, terutama lembaga non-pemerintah internasional, mendukung upaya AJI. Ada beberapa badan PBB yang berkantor di Indonesia.

“ Media mulai merasakan manfaat kebebasan ketika Soeharto runtuh. Publikasi terus muncul. Setelah perubahan, tercatat 1.398 edisi baru. Namun,

hanya terbit 487 edisi hingga tahun 2000. Masalah perburuhan tidak hilang bahkan setelah media ini ditutup. AJI membela pekerja media yang di-PHK saat itu". (Aliansi Jurnalis Independen, 27 Mei 2023)

Dengan dinamika transformasi informasi yang cepat Jurnalis profesional dituntut tidak terjebak pada disinformasi. Tantangan menghadapi permasalahan itu semakin berat kala gempuran media sosial (Medsos). Medsos menjadi ruang publik tempat pertukaran pendapat dan informasi yang sangat populer pada saat ini.

Namun, pertukaran pendapat yang terjadi seringkali memicu berbagai permasalahan di dunia nyata. Sebut saja maraknya disinformasi, ujaran kebencian, kekerasan berbasis gender online (KBGO), doxing, peretasan dan berbagai konten-konten berbahaya lainnya. AJI sebagai organisasi yang mendukung kebebasan pers, berekspresi, dan hak atas informasi, berupaya mencegah peretasan disinformasi dimasyarakat dengan cara-cara kerja pers. Langkah ini konsisten dilakukan AJI mengingat disinformasi dan peretasan juga yang kerap digunakan untuk merusak kebebasan pers atau pun kredibilitas pembela kebebasan pers.

"Tujuan AJI tidak lain untuk mendukung ekosistem informasi yang sehat bagi publik. Sesuai dengan UU Pers nomor 40 tahun 1999, jurnalis memiliki kebebasan dalam menjalani kerja jurnalistik. Sehingga harus ada upaya-upaya teror dan pembungkaman. Setiap serangan baik fisik atau non fisik dan upaya disinformasi tidak dapat dibenarkan. AJI secara jelas mengutuk langkah-langkah tersebut." (M.Rangga Efrizal, 2023)

Tentunya kasus semacam peretasan dan disinformasi pada jurnalis kerap jarang terjadi di Palembang melihat belum ada korban dalam semester 2023 yang disampaikan oleh sekretaris AJI Kota Palembang.

"Hingga semester pertama 2023 AJI Palembang belum mendapatkan informasi adanya jurnalis di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mendapat kasus peretasan atau serangan digital. Kasus kejahatan siber ini sudah sering terjadi menimpa kawan-kawan jurnalis di ibu kota maupun di daerah." (M.Rangga Efrizal, 2023)

Tentunya hal semacam ini sangat perlu tindakan penyelesaian yang dimana Peran AJI sangat dibutuhkan dalam menangani kasus ini apalagi jika sampai menimpa jurnalis, Tindakan tegas yang akan dilakukan dan berbagai upaya dan strategi dilakukan salah satunya memberikan pelatihan keamanan data digital terhadap anggotanya. AJI Palembang terus mengupayakan agar anggotanya dapat

terhindar dari upaya peretasan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggungjawab. Berbagai upaya dan strategi dilakukan salah satunya memberikan pelatihan keamanan data digital terhadap anggotanya. Terbaru AJI Palembang sudah melakukan edukasi yang dilakukan oleh Bidang Organisasi dan Pendidikan pada bulan Maret 2023 lalu.

“Pelatihan-pelatihan tentang keamanan digital ini dinilai perlu ditingkatkan AJI Palembang bagi anggotanya sebagai upaya melindungi jurnalis dari serangan digital.” (M. Rangga Efrizal, 2023)

Tetapi setelah mendapatkan perlindungan tentunya ada resiko yang mungkin akan mengancam profesi jurnalis dan informasi yang diterbitkan. Jurnalis tentunya bisa mendapatkan resiko keamanan pribadi Jurnalis yang menemukan atau menyelidiki kasus peretasan atau disinformasi dapat menjadi sasaran serangan atau ancaman terhadap keamanan pribadi mereka. Pelaku dapat mencoba melumpuhkan atau menyudutkan jurnalis dengan cara menyerang sistem komputer mereka, menyebarkan informasi pribadi yang sensitif, atau bahkan menggunakan kekerasan fisik.

“Serangan digital yang bertujuan untuk menyebar disinformasi bisa terjadi kepada jurnalis atau pun masyarakat sipil. Hal ini tidak lain untuk menyerang pribadi jurnalis tersebut dengan meruntuhkan kepercayaan publik baik organisasi atau media. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk tindakan ancaman yang mengganggu kebebasan pers. Jika tindakan ini dibiarkan akan mengganggu setiap kerja jurnalis dan kredibilitasnya dapat dipertanyakan”. (M. Rangga Efrizal, 2023)

Kerugian Reputasi Jurnalis yang melaporkan kasus peretasan dan disinformasi juga mungkin menghadapi risiko kehilangan reputasi. Para pelaku dapat berusaha memojokkan atau mencemarkan reputasi jurnalis dengan menyebarkan informasi yang salah atau memanipulasi cerita untuk meragukan kredibilitas dan profesionalisme jurnalis. Reputasi jurnalis tersebut dapat kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. persepsi publik dan cara informasi disebarluaskan dapat memengaruhi reputasi seseorang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang Dalam Menghadapi Peretasan dan Disinformasi Jurnalis, maka dari itu untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang Dalam Menghadapi Peretasan dan Disinformasi Jurnalis menggunakan Teori Daugherty dan Pritchard memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Teori Dougherty dan Pritchard mempelajari Peran sebagai sesuatu yang menentukan tindakan dan perilaku individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Menurut teori, peran memiliki tiga elemen penting, yaitu norma, status, dan identitas yang menunjukkan bahwa peran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan tindakan individu. yang mana peran memiliki tiga elemen penting, yaitu norma, status, dan identitas.

Norma menetapkan bagaimana seseorang harus berperilaku dan bertindak dalam suatu peran tertentu. Status seseorang mengacu pada posisinya dalam hierarki organisasi atau masyarakat serta wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya. Identitas seseorang didefinisikan sebagai tingkat keyakinan dan pemahaman mereka tentang peran dan identitas mereka. Ini menunjukkan bahwa peran dapat memengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Peran juga dapat memengaruhi bagaimana jurnalis menangani peretasan dan disinformasi.

Setiap anggota Aliansi memiliki peran khusus yang harus dipenuhi. Peran-peran ini dapat termasuk tanggung jawab, tugas, atau harapan yang harus dipenuhi. Individu atau kelompok mungkin harus mengubah peran mereka karena keadaan sosial dan konteks aliansi berubah.

Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat peneliti terhadap pihak-pihak terkait, berikut saran peneliti kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya peretasan dan disinformasi yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab, serta memberikan edukasi kepada anggota jurnalis tentang bagaimana cara efisien dalam pencegahan menghadapi peretasan dan disinformasi.

Peneliti berharap Aliansi Jurnalis Independen menjadi pusat kepercayaan publik untuk selalu memberikan informasi dan berita yang terpercaya dan tentunya dapat menciptakan dan memberikan contoh yang baik terhadap para jurnalis muda yang akan terjun ke dunia Jurnalistik.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan fokus penelitian yang baru dan lebih mendalam mempelajari hal-hal penting terkait Peran AJI menghadapi peretasan dan disinformasi serta terhadap pelajaran-pelajaran penting lainnya yang terdapat di Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang.

Referensi

- Bogdan ,RC. & Biglen, *Quantitatif Research and introduction to theory and method*, (London; Allyn and Bocan,1992).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Proses Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006), H.72.
- Aliansi Jurnalis Independen, *Sejarah AJI*, Diakses pada 27 Mei 2023
https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen
- Aliansi Jurnalis Independen, *Sejarah AJI*, Diakses pada 27 Mei 2023
<https://ajipalembang.id/sejarah-aji/#>
- Muhammad Rangga Efrizal, Sekretaris AJI Kota Palembang, diwawancarai oleh penulis, Palembang 15 Juni 2023
- Muhammad Rangga Efrizal, Sekretaris AJI Kota Palembang, diwawancarai oleh penulis, Palembang 15 Juni 2023